

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- A. D. Anggraeni, *Kekerasan Seksual Menurut Islam*, Diakses Melalui: eprints.walisongo.ac.id. Pada 10 Januari 2019
- Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, 1987, Bandung: Remaja Karya CV
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung,
- Ani Sri Rahayu, 2018, *Pengantar Pemerintahan Desa*, Sinar Grafika, Malang
- Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- Diana Pangemanan, *Studi Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, 1999
- Esmi Warassih, 2011, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Hadari Nawawi, 1993, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Ika Dwi Putri, 2009, *Kajian Viktimologis Terhadap Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Makassar : Fak. Hukum Universitas Hasanuddin
- I Ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian (Sejarah dan Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM)*
- Mahmutarom, HR., 2016, *Rekonstruksi Konsep Keadilan, Studi Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat, Dan Instrumen Internasional*, UNDIP, Semarang
- Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015

- Michael Victory, *For Better or Worse: Family Violence in Australia*, Unknown Binding, Januari 1, 1993.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Mulida H.Saiful Tency dan Ibnu Elmi A.S., *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, 2009, Malang: Intimedia
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981
- Soetandyo Wignjosebroto, 2002, *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, HUMA, Jakarta
- Soetrisno dan SRDm Rita Hanafie, 2007, *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*, ANDI, Yogyakarta
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : Rajawali, 1986
- Standar Operasional Prosedur Bhabinkamtibmas wilayah hukum Polres Grobogan.
- Stephan Hurwitz, *Kriminologi*, Alih Bahasa Ny. L.Moeljatno, 1986, Jakarta: Bina Aksara
- Sugiono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung
- Vinita Susanti, *Perempuan Membunuh, Istri sebagai Korban dan Pelaku KDRT*, editor, Bunga Sari Fakmawati, Jakarta: Bumi Aksara, 2019
- W.J.S. Poerwadarminta, 2004, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta

2. Jurnal

Rully Trie Prasetyo, Umar Ma'ruf, dan Anis Mashdurohatun, Tindak Pidana Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Formulasi Hukum Pidana, *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12. No. 4 Desember 2017

Siti Ummu Adillah Dan Sri Anik, Kebijakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Informal Berbasis Keadilan Sosial Untuk Meningkatkan Kesejahteraan, *Jurnal Yustisia*, Vol. 4 No. 3 September – Desember 2015, hlm. 559-560.

3. Internet

<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>, diunduh pada tanggal 13 Maret 2021

<http://tribratane.ws.demak.jateng.polri.go.id/fungsi-dan-peran-bhabinkamtibmas/>, diakses pada tanggal 12 Maret 2021

<https://kbr.id/nasional/11-20/sepanjang-2020-83-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-terjadi-di-jateng/104132.html>, Diakses pada tanggal 20 Maret 2021

Komisi Nasional Perempuan, *Catatan Tahunan Komisi Nasional Perempuan Tahun 2019*, Diakses melalui: www.komnasperempuan.go.id, Pada 12 Maret 2019

Yuda Pencawan, “Cara Membedakan Delik Formil dan Delik Materil”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt569f12361488b/cara-membedakan-delik-formil-dan-delik-materil>, diunduh 9 Mei 2021

4. Peraturan Perundang-Undangan

Pancasila;

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomer 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;

Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Pertama Dari Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

PEPU Nomer 1 Tahun 2016 Tentang Kedua dari Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Undang-Undang Nomer 31 Tahun 2016 Tentang Restitusi;

Peraturan Pemerintah Nomer 44 Tahun 2008 Tentang Restitusi;

Peraturan Pemerintah Nomer 43 Tahun 2017 Tentang Restitusi;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

